

Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 3 No 2 (2024), Halaman: 61-71

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Purworejo

Teguh Satria^{1✉}, Suranto², Tunjung Sulaksono³

Inspektorat Kabupaten Purworejo, Indonesia⁽¹⁾

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia^(1,2,3)

✉ teguh.satria.psc23@mail.umy.ac.id

Kata kunci:

Tata Kelola
Kolaboratif; Anak
Putus Sekolah;
Pemerintah Daerah.

Keywords:

Collaborative
Governance; Children
dropping out of school;
Regional Government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi collaborative governance dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo serta hasil penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah di Implementasikan dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo melalui aspek-aspek dimensi collaborative governance yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif, dan proses kolaboratif. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan persepsi, akuntabilitas dan tanggung jawab yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, serta kesulitan memberikan pemahaman kepada anak yang sudah berhenti sekolah untuk mengajak kembali bersekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terpadu untuk meningkatkan kolaborasi antar sektor terkait dan masyarakat dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo.

Abstract

This study aims to examine the implementation of collaborative governance in handling school dropouts in Purworejo Regency. The research method used is a case study using secondary data obtained from the Purworejo Regency Education and Tourism Office and the results of research by the Regional Development Planning Research and Development Agency of Purworejo Regency. The results showed that collaborative governance has been implemented in handling school dropouts in Purworejo Regency through aspects of collaborative governance dimensions which include initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. However, there are obstacles in its implementation, such as differences in perceptions, uneven accountability and responsibility, limited human and financial resources, and difficulties in providing understanding to children who have stopped going to school to encourage them to return to school. Therefore, more systematic and integrated efforts are needed to improve collaboration between related sectors and the community in handling out-of-school children in Purworejo Regency.

DOI:



1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Anak putus sekolah merupakan seseorang yang telah meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya atau dapat juga dikatakan anak usia sekolah yang tidak sekolah lagi dan tidak memperoleh ijazah (Cahyani, 2019). Kondisi sosial ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, kemampuan berfikir rendah, serta kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi sebagian dari beragam faktor yang menyebabkan anak-anak mengalami putus sekolah (Rokhmaniyah et al., 2021). Menurut (Amir-ud-Din et al., 2021) siswa lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah karena kurangnya minat ketika mereka bersekolah di tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada masa pendidikan mereka, namun juga berdampak pada kemungkinan terbatasnya akses mereka terhadap peluang kerja yang layak di masa depan (Rokhmaniyah et al., 2021).

Rilis data dari Kemendikbud (2020) menunjukkan jumlah pelajar yang mengalami putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar untuk beberapa wilayah di pulau Jawa adalah sebagai berikut: DKI Jakarta 181 siswa; Jawa Barat 702 siswa; Jawa Tengah 445 siswa; Yogyakarta 3 siswa. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bahwa pada tahun 2019 tercatat bahwa anak putus sekolah di Indonesia diperkirakan mencapai 4,3 juta di berbagai jenjang pendidikan.

Dalam menangani persoalan tersebut, dibutuhkan tata kelola kolaboratif untuk mengatasi masalah putus sekolah ini. Tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya, menjadi krusial dalam menyusun strategi yang holistik dan terarah (Sanchez-Youngman et al., 2021). Penekanan pada 'kolaborasi' dalam tata kelola kolaboratif berarti bahwa tidak hanya terdapat interaksi antara berbagai aktor yang terlibat, namun interaksi tersebut juga memiliki tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat (Elken, 2023).

Tata kelola kolaboratif merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif dapat mengkonsolidasikan konsensus secara efektif dengan semua pihak dalam meningkatkan antusiasme dan inisiatif mereka (Hou, 2023). Konsep kolaboratif memungkinkan untuk menyelidiki dan menilai karakteristik penting dan hubungan antara tujuan, batasan, struktur, dan proses kolaborasi antarorganisasi serta penerapan dan keterikatan pengaruh mitra (Page & Stone, 2023). Dalam konteks penanganan anak putus sekolah, pendekatan ini menjadi kunci untuk memperoleh solusi holistik dan berkelanjutan. Terdapat beberapa elemen penting yang membentuk landasan teoritis tata kelola kolaboratif dalam penanganan anak putus sekolah.

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan landasan utama dari tata kelola kolaboratif. Partisipasi pemangku kepentingan dapat meningkatkan akuntabilitas, kualitas, transparansi dan upaya mencapai efektivitas dalam sistem pendidikan sehingga menjadi upaya dalam perbaikan sekolah (Çinkir, 2021). Kemitraan multi-pemangku kepentingan dipandang sebagai alat tata kelola kolaboratif yang menjanjikan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas dalam kebijakan global (Pattberg & Widerberg, 2016). (Kurum & Cinkir, 2022) mengembangkan model evaluasi diri sekolah dalam mendukung pengembangan sekolah dan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan. Melalui partisipasi ini, setiap pihak dapat memberikan kontribusi berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka, memungkinkan terciptanya keputusan yang lebih inklusif dan efektif.

Partisipasi pemangku kepentingan sangat penting dalam mengatasi masalah anak putus sekolah. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program-program pendidikan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang

dihadapi dan memungkinkan solusi yang lebih tepat sasaran. Penelitian (Truta et al., 2018) menunjukkan bahwa keterlibatan akademik dari sudut pandang psikologis siswa mempengaruhi terhadap niat putus sekolah dini, sehingga dibutuhkan intervensi untuk menghalangi niat putus sekolah dini tersebut. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi bagi lembaga pendidikan, LSM, keluarga, dan komunitas lokal untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan serta mengidentifikasi strategi yang efektif. Dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif, program-program pendidikan dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh anak-anak yang berisiko putus sekolah (Ponnet et al., 2021). Dalam konteks ini, partisipasi aktif dan inklusif pemangku kepentingan tidak hanya menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik, tetapi juga membangun komitmen bersama dalam memperjuangkan pendidikan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

1.2. Tinjauan Pustaka

Komunikasi memiliki peran sentral dalam penanganan permasalahan pendidikan termasuk persoalan anak putus sekolah (Galetskyi et al., 2021). Dengan komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, keluarga, dan komunitas lokal, informasi tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak putus sekolah bisa tersebar dengan lebih baik. Komunikasi yang terbuka dan terstruktur memungkinkan pertukaran gagasan, solusi, dan informasi terkini tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi suatu permasalahan (Honeck et al., 2021). Selain itu, pendekatan komunikasi orang tua juga dapat diterapkan. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga diperlukan untuk menghindari anak mengalami putus sekolah, memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan (Truta et al., 2018). Dalam penelitiannya (López & Lever, 2017) mengemukakan bahwa pentingnya dukungan dan pengawasan terhadap pekerjaan rumah sekolah dan pedoman komunikasi, sehingga disarankan agar lembaga pendidikan menerapkan strategi yang menyasar konteks keluarga. Kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam upaya penanganan anak putus sekolah menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang berdampak dan berkelanjutan.

Dalam penanganan anak putus sekolah di Indonesia, beberapa program daerah yang dapat dijadikan contoh oleh pemerintah daerah lainnya seperti: Program KUDU Sekolah dari Kabupaten Pekalongan, Gerakan kembali bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Saber DO (Sapu Bersih Drop Out) di Kabupaten Lombok Utara, dan Kelas Parahu di Kabupaten Pangkep Sulawesi Utara. Adapun kesamaan dari keberhasilan program-program tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai pihak dan melibatkan komunitas secara aktif dalam menangani masalah putus sekolah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan bahkan sektor swasta menjadi kunci utama dalam keberhasilan menyelesaikan suatu permasalahan pendidikan (Golovina et al., 2017). Semua pihak mengintegrasikan beragam sumber daya dan strategi untuk mencapai tujuan bersama, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dukungan finansial bagi keluarga yang membutuhkan, hingga pendekatan sosial dan psikologis yang memotivasi siswa untuk kembali ke sekolah. Dalam program-program ini, terlihat bahwa tata kelola kolaboratif menjadi landasan yang kuat untuk menekan angka putus sekolah di masing-masing daerah.

Berdasarkan tinjauan permasalahan di atas, penelitian ini berusaha mengkaji tata kelola kolaboratif yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menangani anak putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik kolaboratif yang dilakukan dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo, serta menganalisis langkah antisipasi yang akan dilakukan agar angka anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo tidak meningkat. Serta peneliti akan memberikan sedikit gambaran terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani persoalan anak putus sekolah.

Manfaat dari penelitian ini adalah agar peneliti dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan persoalan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam menyusun kebijakan dan program penanganan anak putus sekolah yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi para peneliti dan praktisi di bidang pengembangan dan penerapan tata kelola kolaboratif dalam penanganan anak putus sekolah di daerah lain. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian persoalan anak putus sekolah di Indonesia pada umumnya.

2. METODE

2.1. Rancangan Penelitian dan Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengertian metode penelitian kualitatif menurut (Sugiono, 2013) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan dilakukan secara generalisasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang lebih lengkap, mendalam dan bermakna, sehingga tujuan penelitian untuk mengkaji collaborative governance yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menangani persoalan anak putus sekolah di Kabupaten

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan konstan terjadi di berbagai lini kehidupan, dari teknologi hingga tuntutan masyarakat. Di tengah dinamika ini, inovasi menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, seringkali potensi inovatif masyarakat di daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Terdapat kebutuhan untuk menggerakkan partisipasi lebih aktif dari masyarakat dalam proses inovasi untuk mewujudkan solusi-solusi yang relevan dengan realitas lokal. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara mendalam tentang bagaimana inisiatif pemerintah memiliki peran krusial dalam memfasilitasi dan mendorong partisipasi inovasi masyarakat di daerah. Melalui serangkaian program, kerjasama, dan langkah strategis, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang merangsang kreativitas dan kolaborasi dalam rangka menghasilkan solusi-solusi inovatif yang memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah. Dari pembahasan ini, diharapkan akan tergambar secara jelas bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator utama dalam mendorong inovasi yang merata dan inklusif di tingkat lokal.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menangani persoalan anak putus sekolah, maka perlu dideskripsikan dengan menganalisis dimensi-dimensi yang mempengaruhinya, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008; Tefft et al., 2021)

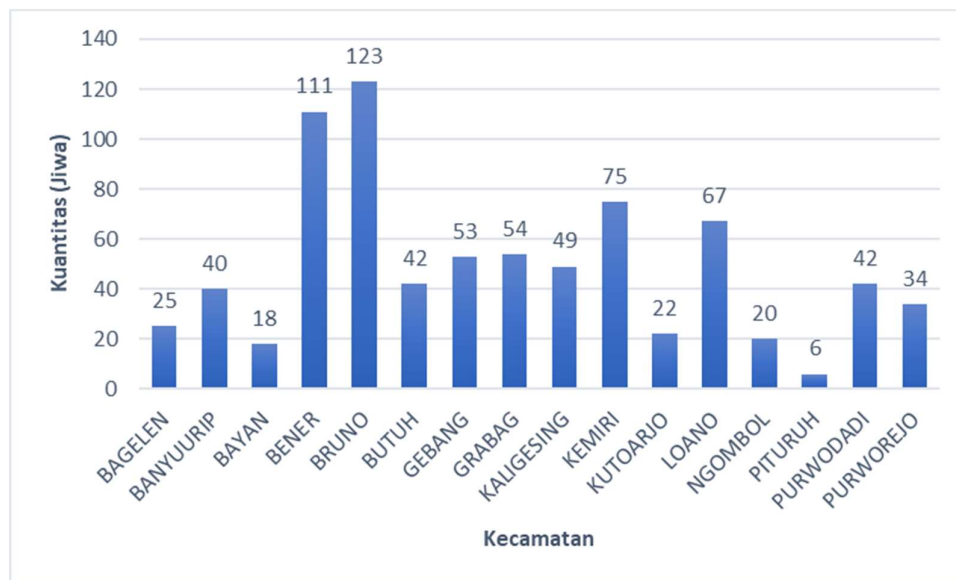
1. Kondisi Awal

Penanganan anak putus sekolah di setiap daerah memiliki pola yang berbeda, termasuk penanganan yang telah dilakukan di Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian tentang tata kelola kolaboratif dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten

Purworejo dengan mengumpulkan data-data sekunder yang ada di Kabupaten Purworejo. Kemudian penulis melakukan analisa mendalam untuk melihat keterkaitan tata kelola kolaboratif dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo.

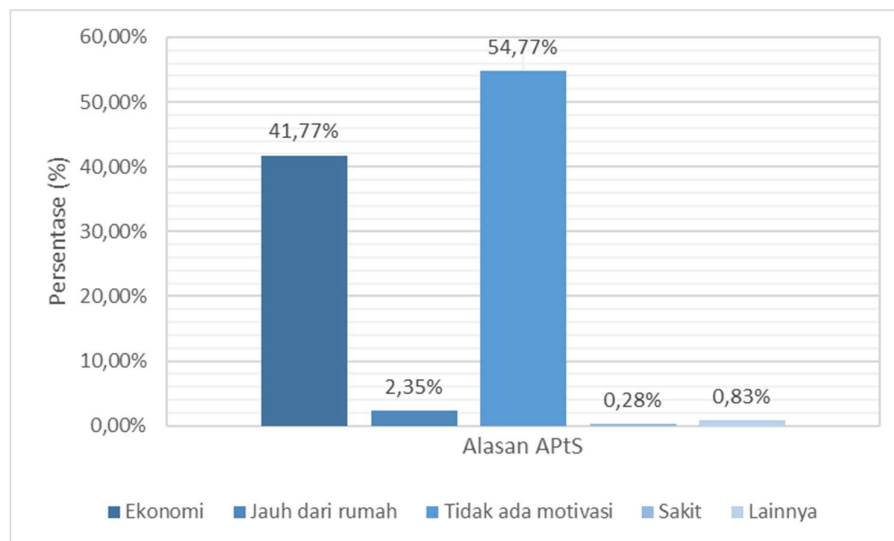
Dalam hasil penelitian terdahulu mengenai anak putus sekolah di kabupaten purworejo, berdasarkan data dari dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Purworejo pada tahun 2022, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo sebanyak 781 anak dari total 863 anak tidak sekolah. Kecamatan Bruno memiliki anak putus sekolah paling banyak sejumlah 123 anak, diikuti oleh kecamatan Bener sebanyak 111 anak, dan paling rendah adalah kecamatan Pituruh sejumlah 6 anak.

Gambar 1. Kuantitas APtS Di Kabupaten Purworejo



(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo Tahun 2022)

Hasil penelitian (Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, 2022) menyebutkan bahwa alasan utama untuk memilih putus sekolah adalah tidak ada motivasi dari siswa itu sendiri (54,77%), motif ekonomi (41,77%), jarak dari rumah ke sekolah (2,3%), sakit (0,28%) dan lainnya (0,83%). Pada beberapa kecamatan yang cukup jauh dari pusat kota Purworejo, seperti Kecamatan Bruno, Bener, Loano, Gebang dan Kemiri, alasan ekonomi menjadi alasan yang paling mendominasi. Sehingga perlu untuk ditindaklanjuti, salah satunya dengan melihat kondisi keluarga dari siswa APtS tersebut. Sedangkan motivasi menjadi alasan kedua terkuat setelah alasan ekonomi, dan hampir semua wilayah kecamatan ditemukan. Sedangkan alasan jarak sekolah dari rumah tidak terlalu signifikan muncul dalam daftar alasan tersebut. Terdapat asumsi, bahwa jauhnya jarak sekolah telah ditutupi dengan ketidakhadiran motivasi yang dimiliki oleh anak.

Gambar 2. Alasan Putus Sekolah yang terjadi Di Kabupaten Purworejo

(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo Tahun 2022)

2. Desain Kelembagaan

Proses Kolaborasi yang sudah berjalan di Kabupaten Purworejo adalah kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Dinas Sosial Kabupaten Purworejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Kepemudaan, Akademisi, Sektor Swasta, dan Masyarakat Peduli Pendidikan. Dalam proses Kolaborasi tersebut dinilai masih sangat kurang dan belum memiliki sebuah pengelolaan program penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian (Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, 2022) untuk meningkatkan peran para pihak dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo disusun sebuah model pengelola program di berbagai level dengan peran dan tanggung jawab yang disusun untuk saling melengkapi.

Pengelola Tingkat Kabupaten yang memiliki dasar hukum pembentukan yang kuat, seperti pembentukan SK Bupati penanganan anak putus sekolah sebagai landasan hukum dalam aktivitas penanganan anak putus sekolah. Komponen di dalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 1). Kelompok Kerja Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, bertugas untuk mengkoordinasikan peningkatan akses dan mutu pendidikan, 2). Kelompok Kerja Pendataan, bertugas untuk mengkoordinasikan pengumpulan data, memverifikasi dan memvalidasi, mengolah serta menganalisis data ATS di Kabupaten Purworejo, 3). Kelompok Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Pendidikan, bertugas untuk mengkoordinasikan pengelolaan, pengembangan dan penguatan kemitraan dalam mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung program.

Pengelola Tingkat Kecamatan yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pendataan anak putus sekolah, mengkoordinasikan pengelola di tingkat desa/kelurahan dalam proses jangkauan APTS; Mengkoordinasikan pengelola di tingkat desa/kelurahan dalam proses jangkauan APTS ke rumah-rumah (data by name by adress), menerima data dari desa terkait APTS yang bersedia dan tidak bersedia; Monitoring dan Evaluasi APTS, yaitu melakukan monev terhadap satuan pendidikan formal dan nonformal penerima APTS, menyusun laporan perkembangan anak

yang dikembalikan ke sekolah (SD/MI, SMP/MTs) sebagai hasil monev dikembalikan ke sekolah; Kemitraan dan Pembiayaan APTs, yaitu memberikan pembekalan kepada pengelola di tingkat desa/kelurahan dan mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program serta mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program.

Pengelola tingkat desa/kelurahan memiliki tugas dan kewenangan diantaranya elola Tingkat Desa/Kelurahan Perencanaan dan Pendataan AptS tingkat desa/kelurahan: Perencanaan dan Pendataan AptS, yaitu menyusun rencana program/kegiatan, melaksanakan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data AptS; angkauan AptS, yaitu melaksanakan proses jangkauan AptS ke rumah-rumah (data by name by adress), mengomunikasikan dan memediasi siswa dan keluarga AptS agar bersedia kembali bersekolah, menyampaikan data AptS yang bersedia dan tidak bersedia dikembalikan ke sekolah kepada pengelola di tingkat kecamatan; Monitoring dan Evaluasi AptS, yaitu melakukan *cross check* data AptS yang akan dikembalikan sesuai kriteria, memastikan dukungan keluarga terhadap anak yang dikembalikan ke sekolah; dan Melakukan penguatan kepada orang tua dan siswa yang telah dikembalikan/calon siswa yang akan dikembalikan serta mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program.

Dengan menerapkan teori desain kelembagaan dalam konteks tata kelola kolaboratif, data-data yang telah dikumpulkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo secara efektif.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Aspek kepemimpinan dalam kolaborasi tidak hanya diperuntukkan bagi pemimpin pemerintahan atau pemimpin lembaga organisasi atau instansi, namun siapapun memiliki potensi menjadi pemimpin yang fasilitatif jika mampu memotivasi, memfasilitasi, serta mendorong pencapaian tujuan kolaboratif dengan efektif (Donahue et al., 2011; Emerson & Nabatchi, 2015). Seseorang yang dapat mendorong, memfasilitasi, dan menghubungkan para pelaku atau pemangku kepentingan dalam kolaborasi dapat dianggap sebagai pemimpin fasilitatif.

Dalam konteks kepemimpinan fasilitatif, fasilitasi dilakukan tanpa mengganggu hak-hak para pemangku kepentingan. Peran seorang fasilitator adalah memastikan keseluruhan proses pembentukan konsensus tetap terjaga dalam integritasnya (Emerson et al., 2012). (Atkinson et al., 2023) mengembangkan lebih jauh gagasan kepemimpinan fasilitatif sebagai cara untuk mewakili dan memahami gaya kepemimpinan yang mampu mendorong pendekatan inklusif terhadap pembangunan lokal. (Atkinson et al., 2023) menekankan adanya dimensi temporal dalam kepemimpinan fasilitatif yaitu cara kepemimpinan dapat berubah seiring waktu dan seiring dengan perubahan situasi.

Kepala perangkat daerah memainkan peran krusial dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun sering kali dihadapkan pada tantangan pergeseran pimpinan yang memerlukan adaptasi yang cepat. Hal ini menuntut kepemimpinan yang responsif dan tanggap terhadap dinamika organisasi serta kebijakan, sehingga mampu menjaga kontinuitas serta konsistensi dalam pencapaian tujuan strategis pemerintahan daerah, termasuk dalam penanganan anak putus sekolah.

Penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif. Dalam penanganan anak putus sekolah, Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan adalah pejabat yang diberikan tugas pokok dalam urusan pendidikan di Kabupaten Purworejo meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, serta menyelenggarakan fungsi dalam perumusan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memfasilitasi kolaborasi antar instansi pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan lainnya untuk dapat menyelesaikan persoalan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku pejabat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dapat memfasilitasi dan membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam implementasi tata kelola kolaboratif sehingga pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah dapat berjalan lebih cepat.

Penerapan teori kepemimpinan fasilitatif dalam tata kelola kolaboratif dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait (De Weger et al., 2018). Hal ini akan memperkuat upaya untuk menemukan solusi yang relevan dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi menitikberatkan pada proses interaksi dan kerja sama antar berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama (De Medeiros et al., 2018). Pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak terlibat. Hal ini dapat mengarah pada pendekatan yang lebih holistik dalam memahami alasan anak putus sekolah dan menemukan solusi yang bersifat inklusif. Proses kolaborasi menekankan pada proses pembentukan pemahaman bersama mengenai masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, membangun pemahaman bersama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah dapat membantu merumuskan solusi yang lebih efektif. Proses kolaborasi juga mendorong proses pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif. Dalam konteks ini, menemukan solusi yang diterima bersama oleh semua pihak menjadi penting untuk kesinambungan program dan intervensi.

Proses kolaboratif dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo sudah dilaksanakan di beberapa hal berikut; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerja sama dengan Desa dan Kelurahan setempat melaksanakan program fasilitasi anak yang berhenti sekolah untuk kembali bersekolah. Program tersebut dilaksanakan guna mengajak anak yang sudah berhenti sekolah dan memberikan bantuan berupa biaya sekolah, pakaian sekolah, buku pelajaran dan bantuan berupa uang saku. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan akademisi dalam rangka melakukan penelitian model penanganan anak putus sekolah. Penelitian tersebut dilaksanakan guna menyusun model penanganan anak putus sekolah dalam rangka menurunkan angka anak putus sekolah serta merumuskan arah kebijakan dan strategi penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo.

Tata Kelola Kolaborasi dalam menangani anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Munculnya cara pandang persepsi yang berbeda di antara para pemangku kepentingan, yang dapat menimbulkan ego sektoral dan kurangnya kepercayaan terhadap kinerja.
- b. Belum optimalnya proses kolaborasi yang terjalin antara pemangku kepentingan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya sehingga penanganan persoalan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

- c. Ketersediaan sumberdaya keuangan masih lemah. Para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah, masih bergantung pada dana pemerintah untuk melaksanakan setiap kegiatan.
- d. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya teknis. Kurangnya pemangku kepentingan dan tenaga teknis atau tenaga ahli menghambat proses pelaksanaan program tersebut. Hal ini disebabkan oleh penumpukan tugas yang dilakukan oleh personil yang terbatas, sehingga persoalan anak putus sekolah tidak jarang tertunda.
- e. Sulitnya memberikan pemahaman kepada anak yang sudah terlanjur berhenti sekolah sehingga upaya tersebut sering gagal mengajak anak tersebut kembali ke bangku sekolah.

Teori proses kolaborasi memperlihatkan bahwa tata kelola kolaboratif yang sukses dalam menangani masalah seperti anak putus sekolah membutuhkan proses yang terstruktur, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak terlibat. Dalam melakukan analisis lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan bagaimana interaksi dan proses kolaboratif ini dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menghadapi persoalan anak putus sekolah dapat dipengaruhi oleh beberapa dimensi. Dimensi-dimensi tersebut antara lain kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif dan proses kolaboratif. Berdasarkan kondisi awal, dapat diketahui bahwa alasan utama anak untuk memilih putus sekolah adalah tidak ada motivasi dari siswa itu sendiri (54,77%), motif ekonomi (41,77%), jarak dari rumah ke sekolah (2,3%), sakit (0,28%) dan lainnya (0,83%). Dari sisi kelembagaan belum optimalnya kolaboratif yang terjalin selama ini, akan tetapi Bappedalitbang Kabupaten Purworejo selaku unsur litbang di Kabupaten Purworejo mengajukan sebuah model penanganan anak putus sekolah dengan pengelola program di berbagai level dengan peran dan tanggung jawab yang disusun untuk saling melengkapi. Terkait kepemimpinan fasilitatif dalam penanganan persoalan anak putus sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo memiliki kepemimpinan fasilitatif karena dapat menggerakkan dan memfasilitasi proses kolaborasi dalam penanganan persoalan anak putus sekolah di Kabupaten Purworejo. Proses kolaborasi yang sudah terlaksana di Kabupaten Purworejo sudah cukup baik, akan tetapi harus terus di tingkatkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir-ud-Din, R., Mahmood, H. Z., Abbas, F., Salman, V., & Zafar, S. (2021). Leaving studies because of lack of interest: an analysis of the risk factors of school dropouts in Pakistan. *Quality and Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01266-9>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atkinson, R., Tallon, A., & Casado-Diaz, M. (2023). Leadership, urban structure and place: evidence from Bristol and Dorset. *Urban Research and Practice*. <https://doi.org/10.1080/17535069.2023.2236585>
- Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. (2022). *Model Penanganan Anak Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Purworejo* (Vol. 1, Issue 201310200311137). ENVIRONESIA GLOBAL SARAYA.
- Cahyani, V. U. (2019). Analisis Faktor Pemberian Intervensi Gizi Spesifik pada Anak Usia 6-12 Bulan dengan Kejadian Stunting berbasis Transcultural Nursing. In *Perpustakaan Universitas Airlangga* (Issue 1).
- Çinkir, S. (2021). School Self-Evaluation as a Trigger for School Improvement. In *Empowering Education: Research, Theory And Practice* (pp. 11–34). Peter Lang AG. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107396886&partnerID=40&md5=4fb6358bc55bf760fe8f922f86ddb44c>
- De Medeiros, J. F., Vidor, G., & Korzenowski, A. L. (2018). Review of experimental methods to optimise the collaboration between organisations in the new product development process. *International Journal of Business Innovation and Research*, 15(4), 467–482. <https://doi.org/10.1504/IJBIR.2018.090463>
- De Weger, E., Van Vooren, N., Luijkx, K. G., Baan, C. A., & Drewes, H. W. (2018). Achieving successful community engagement: A rapid realist review. *BMC Health Services Research*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3090-1>
- Donahue, J., Zeckhauser, R., & Breyer, S. (2011). Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times. *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*, 1–305. <https://doi.org/10.1515/9781400838103>
- Elken, M. (2023). Collaborative design of governance instruments in higher education. *Studies in Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2258905>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. In *Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1353/book44406>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Galetsy, S., Turzhanska, O., & Galetskaya, T. (2021). Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university. *Youth Voice Journal*, 2021(Special issue 1), 43–60. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85103961854&partnerID=40&md5=516bc15b7dedf5f68bce35afec5cc7d4>
- Golovina, T. A., Merkulov, P. A., & Polyagin, A. V. (2017). Strategic vectors of the development of the state support of youth entrepreneurship in Russia. *Ekonomicheskaya Politika*, 12(5), 42–61. <https://doi.org/10.18288/1994-5124-2017-5-03>
- Honeck, E., Gallagher, L., von Arx, B., Lehmann, A., Wyler, N., Villarrubia, O., Guinaudeau, B., & Schlaepfer, M. A. (2021). Integrating ecosystem services into policymaking – A case study on

- the use of boundary organizations. *Ecosystem Services*, 49. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101286>
- Hou, X. (2023). A study on collaborative governance of research integrity in institutions based on SFIC model—Taking the practice of research integrity construction of Chinese Academy of Sciences as an example. *Kexue Tongbao/Chinese Science Bulletin*, 68(21), 5762–5769. <https://doi.org/10.1360/TB-2023-0018>
- Kurum, G., & Cinkir, S. (2022). The use of stakeholder voice through school self-evaluation in Turkish schools. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 34(3), 361–389. <https://doi.org/10.1007/s11092-022-09385-z>
- López, K. M. D., & Lever, C. O. (2017). Contexto sociofamiliar en jóvenes en situación de abandono escolar en educación media superior: Un estudio de caso. *Perfiles Educativos*, 39(158), 70–90. <https://doi.org/10.22201/iissue.24486167e.2017.158.58784>
- Page, S. B., & Stone, M. M. (2023). Collaborative Architecture: Components, Relationships, and Implications for Partner Influence. *Perspectives on Public Management and Governance*, 6(1), 14–27. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvac027>
- Pattberg, P., & Widerberg, O. (2016). Transnational multistakeholder partnerships for sustainable development: Conditions for success. *Ambio*, 45(1), 42–51. <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0684-2>
- Ponnet, H., Vangrunderbeek, H., & McCarthy, L. (2021). The Flemish Interactive Coaching Monitoring System. *International Sport Coaching Journal*, 8(2), 253–262. <https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0093>
- Rokhmaniyah, R., Suryadari, K., Mahmudah, U., Fatimah, S., & Wahyudi, W. (2021). Exploration Study of Factors Caused Out of School Rate, Impact, and Strategies to Overcome Them. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3516875.3516946>
- Sanchez-Youngman, S., Boursaw, B., Oetzel, J., Kastellic, S., Devia, C., Scarpetta, M., Belone, L., & Wallerstein, N. (2021). Structural Community Governance: Importance for Community-Academic Research Partnerships. *American Journal of Community Psychology*, 67(3–4), 271–283. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12505>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April). Alfabeta, Bandung.
- Tefft, J., Jonasova, M., Zhang, F., & Zhang, Y. (2021). *Urban Food Systems Governance: Current Context and Future Opportunities*. FAO and the World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/35936>
- Truta, C., Parv, L., & Topala, I. (2018). Academic engagement and intention to drop out: Levers for sustainability in higher education. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124637>